

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA KOTA BALIKPAPAN

Feri¹

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung bahagia Kota Balikpapan, Karena volume sampah Kota Balikpapan semakin tahun semakin meningkat masalah sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu sampah yang dihasilkan semakin meningkat. =Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Merrile Grindli, “pengukuran Keberhasilan implementasi dapat dilihat pada prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project yang kedua apakah tujuan program itu tercapai” diidentifikasi dengan dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi, yaitu isi kebijakan (context of policy) dan konteks dari implementasi itu sendiri (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informen yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan cukup efektif tetapi belum maksimal untuk komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi masyarakat belum semua memahami dampak dari sampah. Sumber daya aparatur yang kurang untuk mengatasi sampah, dan kendaraan operasional yang masih terbatas.

Kata Kunci : *Implementasi PERDA, Sampah Rumah Tangga*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : vindaangraini@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah mengenai masalah sampah. Permasalahan sampah yang terlihat hingga saat ini sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, dan polusi air yang dikarenakan penanganan air lindi (*leachate*) yang kurang tepat, serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir. Itu berarti pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan selain akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Permasalahan sampah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat menyebabkan timbul sampah semakin tinggi, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, serata pendekatan 3R (*reduse, reuse, recycle*) belum berjalan dengan baik. Permasalahan sama juga dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosio-politik (Sejati, 2009:33).

Meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2016 rata-rata 400 ton/hari khusus kelurahan Gunung Bahagia 8-10 ton/hari memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah ramah lingkungan akan menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan laut. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Sampah sudah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolalan perlu dilakukan secara komperehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumsah Tangga.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dan dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termaksud keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apayang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2010:87).

Kemudian (Gardon, 1986: 6), mengatakan bahwa implemementasi berkenaan dengan berbagi kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrasi mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diselesaikan. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interprestasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994: 15) implementasi kebijakan ditentukan oleh konteks implementasinya. Ide dasarnya bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementabilty* dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Hal ini dipertegas oleh (Chief J. O. Udoji, 1981:79) dengan mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. “kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berbicara tentang implementasi kebijakan perlu untuk memahami konsep serta cara dan teknik yang digunakan agar implementasi dari kebijakan uraian diatas menurut penulis implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, yang artinya bahwa memandang implementasi bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan terhadap seluruh pendukung pelaksanaan kebijakan implementasi pada sisi yang lain yang merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu output maupun sebagai suatu dampak (*outcome*), implementasi juga dapat diartikan dalam konteks output atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada sekedar pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik, kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (dalam syukani dkk, 2003:296) bahwa ada dua hal yang menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Conten Of Policy*
 - a. *Interest affected* (kepentingan siapa saja yang terlibat)
 - b. *Type the benefit* (macam-macam manfaat)
 - c. *Extent of change envisioned* (sejauhmana perubahan akan diwujudkan)
 - d. *Site if decision making* (tempat pembuatan keputusan)
 - e. *Programme implementers* (siapa yang akan menjadi implementor agensi)
 - f. *Resources commited* (sumber daya yang disediakan)
2. *Context Of Implementation*
 - a. *Power, interest and strategy of actors involved* (kekuasaan kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat)
 - b. *Institutions an regime characteristics* (karakter lembaga dan rejim)
 - c. *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan responsife)

Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan **Peraturan Daerah** (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak dapat digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009: 67) sementara dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Menurut Hadiwiyoto (Sejati, 2009:13)

Konsep Pengelolaan Sampah

Dalam disiplin ilmu manajemen kata “Pengelolaan” dapat disamakan atau diartikan dengan istilah manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31).

Secara Umum Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan

sampah, pengumpulan sampah, transfer sampah, pengolahan, dan pambungan akhir (Sejati, 2009: 24).

Sistem Pengelolaan sampah yang efektif harus terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan rantai dari pengelolaan sampah, yaitu tahap pemilahan sampah dan dan pengolahan pada sumber, pengumpulan, pembuangan sementara, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Keberhasilan setiap tahap tersebut sangat ditentukan oleh dukungan beberapa aspek yaitu aspek teknik operasional , aspek kelembagaan pengelolaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek hukum dan peraturan yang mendukung (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, sehingga menampakkana tau menggambarkan secara jelas sesuatu yang diteliti. Berdasarkan judul skripsi ini maka definisi konsepsional penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah No. 13 tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tanggah di Kelurahan Gunung Bahagia merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah kota Balikpapan No. 10 Tahun 2015 tentang sistem pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah kota Balikpapan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan.

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menerapkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan”.

Penelitian ini tidak menguji hipotesis atau tidak menggunakan hipotesis, melainkan *hanya* mendeskripsikan informal apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih untuk melakukan penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan keadaan di lapangan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah “Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan”.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian,

Maka fokus dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan daerah No 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - a. Mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga

- b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
 - c. Efektivitas program MRF dalam mengurangi volume sampah di Kelurahan Gunung Bahagia
2. Faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah no 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi keperustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi. Adapun teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi studi dokumen, dan wawancara.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang tidak mungkin tidak jelas sehingga dengan adanya wawancara diharapkan dapat memperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti.

Adapun observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian sedangkan studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara. Seperti yang dikemukakan oleh penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:247) sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)
Pengumpulan Data dan masih bersifat mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian keperustakaan dan dokumentasi serta data sekunder lainnya yang berhasil di peroleh.
2. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
Reduksi Data adalah proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahapan ini merupakan tahapan analisis data yang mempertajam, memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian Data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan dalam penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan Kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi makna-makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Bahagia kota Balikpapan maka dapat dirincikan hasil pembahasan yang akan menjadi fokus dari pada penelitian ini yakni sebagai berikut : Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mekanisme dan Perosedur Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhirnya secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan, dan pambungan akhir (Sejati, 2009: 24).

Sistem Pengelolaan sampah yang efektif harus terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan rantai dari pengelolaan sampah, yaitu tahap pemilahan sampah dan dan pengolahan pada sumber, pengumpulan, pembuangan sementara, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Keberhasilan setiap tahap tersebut sangat ditentukan oleh dukungan beberapa aspek yaitu aspek teknik operasional , aspek kelembagaan pengelolaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek hukum dan peraturan yang mendukung (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002).

Mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah merupakan cara untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, sehingga sampah tidak menjadikan gangguan kesehatan dan lingkungan hidup.berdasarkan hasil Mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah yang digunakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan pada saat ini untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Balikpapan menerapkan mekanisme pengelolaan sampah ramah lingkungan ala Jepang yang diberi nama Halte Sampah. Model ini berkonsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Seiring pertumbuhan penduduk dan laju perekonomian Balikpapan lantas memanfaatkan kesempatan mengurangi volume sampah yang di buang ke TPA. Apalagi sampah memiliki potensi sebagai sumberdaya melalui sistem daur ulang.Pemerintah Balikpapan melibatkan JICA, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup serta DKPP untuk menjalankan halte sampah.

Penyediaan Fasilitas Saranadan Prasarana

Menurut (Sudibyo, 2009:34) sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS), armada opsional, petugas persampahan dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Sarana prasarana disini merupakan salah satu factor pendukung pengelolaan sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, sebuah kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fasilitas sarana dan prasarana berupa tempat penampungan sampah sementara (TPS) oleh pemerintah sudah cukup menunjang. Masyarakat merasa cukup dengan penyediaan dan penempatan TPS di wilayah mereka. Walaupun masih terdapat kekurangan didalamnya seperti kapasitas atau muatan konteiner yang masih kurang untuk menampung sampah dan permasalahan lain pada alat angkut yaitu jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh pihak DKPP, sering mengalami keterlambatan sehingga membuat sampah yang ada di TPS berceceran hingga Keluar.

Efektivitas Material Recovery Faciliti (MRF) Mengurangi Volume Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan ada berbagai hal yang dibutuhkan sebagai salah satu titik ukur untuk perolehan hasil yang efisien, efektif dan maksimal. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Efektivitas yang dimaksud disini adalah efektivitas program *Material Recovery Faciliti (MRF) Mengurangi Volume Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia* dalam ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan partisipasi masyarakat adanya

partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan program atau kegiatan tersebut. Dengan membuang sampah tepat waktu, (*Reduce*), minimalisasi barang atau material yang digunakan semakin banyak menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan, (*Reuse*) memilah barang yang bisa dipakai kembali menghindari pemakaian barang yang sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian, (*Recycle*) Mengubah jenis sampah menjadi kompos agar bisa digunakan kembali atau membuat sampah menjadi bernilai ekonomi dengan kreatifitas yang ada. Faktor penghambat dalam efektivitas *Material Recovery Faciliti* (MRF) menangani masalah sampah di Kelurahan Gunung Bahagia, karena masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Implementasi Peraturan Daerah NO 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah dilaksanakan sejak tahun 2015 seiring berjalanya kebijakan ini terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Pada strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi agar peran masyarakat dapat berjalan. Selain itu perlu juga mengubah tradisi masyarakat, membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih dan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah sampah. Keuntungan yang didapat jika peran masyarakat berjalan adalah volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat berkreasi mengelola sampah agar sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Pada program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 3R (Sejati, 2009: 64).

Partisipasi masyarakat dalam hal ini pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu membuang sampah sesuai waktu, yang telah ditentukan sangat dibutuhkan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan masih adanya masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan dan juga masih ada masyarakat yang tidak mengikuti himbauan Dinas Kebersihan untuk menjalankan program 3R. Sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan masih kurang. Partisipasi masyarakat yang menjadikan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana disini merupakan salah satu faktor pendukung pengelolaan sampah dalam menjaga keberihan lingkungan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, proses pengelolaan sampah tidak dapat terlaksana dengan baik. Menurut (Sudiby, 2009 : 23) sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang tidak dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan sampah, yaitu kurangnya alat pengangkut karena volume sampah yang ada di Kota Balikpapan semakin meningkat dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tipe tahunnya serta terbatasnya anggaran dana sehingga pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman belum bisa menambah alat pengangkut atau armada operasional dan petugas. Namun lebih diharapkan lagi kedepannya agar sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan lagi demi terciptanya proses pengelolaan sampah yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kelurahan Gunung Bahagia kota Balikpapan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah yang digunakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan pada saat ini untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Balikpapan menerapkan mekanisme pengelolaan sampah ramah lingkungan ala Jepang yang diberi nama Halte Sampah, Model ini berkonsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Bahwa pengendalian sampah yang dilakukan agar dapat mengetahui sampah atau material yang sudah dibuang tetapi masih dapat dimanfaatkan kembali selain bersifat ekonomis juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.
2. Mekanisme pengumpulan sampah terdiri dari 3 cara yaitu pertama warga memilah sampah organik dan sampah nonorganik yang kedua mengemas sampah kemudian bisalansung ditaruh dihalte sampah yang telah disepakati tempatnya untuk waktu pebuangan sampahnya sendiri dari jam 7-9 pagi dan yang ketiga sampah telah dikemas oleh warga dari tempat timbulnya, petugas MRF mendatangi Halte sampah menggunakan mobil pickap lalu membawahnya ke MRF agar sampah dipilah kembali sebelum di antar ke TPA.
3. Penyediaan Fasilitas sarana dan Prasarana Fasilitas pengelolaan sampah sudah cukup menunjang khususnya di Kelurahan Gunung Bahagia akan tetapi dengan berjalanya program *Material Recovery Faciliti* (MRF) di kelurahan gunung bahagia TPS yang beroperasi tinggal 1 yang tadinya ada 4 buah, karena masyarakat tidak harus membuang sampah ke TPS tetapi Halte Sampah yang ada di depan rumah warga yang akan diangkut oleh petugas *Material Recovery*

Faciliti (MRF). Dan untuk TPA Manggar Kota Balikpapan sudah Standar Oprasional Prosedur (SOP) saat ini lahan TPA 44,8 Ha yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan, masih cukup menampung volume sampah masyarakat sampai 50 tahun kedepan.

4. Efektivitas *Material Recovery Faciliti* (MRF) mengurangi volume sampah di Kelurahan Gunung Bahagia sudah cukup baik Sebagian besar masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia telah turut serta membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan dengan berkurangnya timbunan sampah pada siang hari.
5. Dengan adanya program *Material Recovery Faciliti* (MRF) sampah akhir-akhir ini tidak lagi mengganggu aktivitas warga, selain karena mengganggu pemandangan, juga merusak nilai estetika karena sampah-sampah tersebut menyebarkan aroma yang kurang sedap dan dikerumuni oleh lalat. Dikhawatirkan, bila hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, sampah ini akan menjadi sumber masalah. Sehingga, dirasakan sudah cukup efektif dalam mengurangi timbunan volume sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan.
6. Pembuangan sampah akhir dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) manggar. Sampah yang sudah dikumpulkan dihamparkan, ditimbun, dipadatkan lalu ditutup dengan proses berulang-ulang. Metode yang digunakan yaitu sanitary landfill, dimana pemerintah juga menyediakan saluran drainase, saluran pengumpulan air lindi dan kolam penampungan, pos pengendalian oprasional, alat berat untuk membatu proses akhir sampah, serta pemerintah juga menyediakan pengendali gas mentana yang di tampung untuk digunakan warga sekitar TPA manggar dan juga digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU).
7. Hambatan dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini adalah sebagian masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah, yaitu kurangnya alat pengangkut atau armada oprasional dan petugas lapangan pengangkut sampah, yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran dana unuk Dinas Kebersihan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik dengan. Namun pada dasarnya masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga kedepannya kebijakan pengelolaan sampah ini dapat mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan temuan dilapangan, yaitu :

1. Dalam hal sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah bisa dengan memasang baliho ataupun poster mengenai kesadaran akan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum, dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bisa lebih sering dilakukan dan sosialisasi melalui media elektronik seperti di televise dan radio agar implementasi berjalan efektif.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, maka pemerintah kota khususnya Dinas Kebersihan Kota Balikpapan untuk meninjau kembali letak TPS agar mudah dijangkau oleh masyarakat, dan disarankan Selain usaha untuk meningkatkan sistem pengoperasian TPA, Pemda Kota Balikpapan sebaiknya mulai merintis untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah pada skala individual atau kawasan dalam rangka meningkatkan umur TPA yang saat ini ada.
3. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, Pemerintah Kota Balikpapan harus memberikan insentif yang cukup kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur dan petugas kebersihan dalam hal insentif.
4. Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pelaksana kebijakan harus bisa mempertahankan prestasi yang didapat TPA Manggar yang diharapkan dalam hal peninjauan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala minimal 1 bulan 2 kali ada aparatur yang meninjau ke lapangan agar lebih baik lagi
5. Mengenai sarana dan prasarana pemerintah harus menambahkan alat operasional untuk mengangkut sampah, yang semakin tahun volume sampah semakin bertambah agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
6. Untuk Program MRF di Kelurahan Gunung Bahagia, seharusnya untuk mengurangi sampah tidakhanya melakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering, tetapi juga melakukan pendauran ulang dan pemnafatan kembali sampah agar sampah yang di setor ke TPA bisa diminimalisir. Dengan biaya- operasional yang dikeluarkan MRF Kelurahan Gunung Bahagia Tidak efisien dikarenakan kalau hanya memilah sampah pihak TPA juga siap karena disana juga ada petugas 3R dan Pemulung.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solihin (2008) *Analisiskebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.*, Negara Edisi Kedua PT Bumi Aksara:
- Fattah Nanang. 2004.*Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah.* Pustaka Bani Quraisy: Bandung
- Grendle, Merilee S. (ed) 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World.* New Jersey: Princenton Universiti Press
- Manik, K.E.S. 2003 *Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Djambatan. Jakarta.
- Namawi, Ismail 2009.*Public Policy: Analisis, Strategi Avokasi Teoridan Praktek.* Putra Media Nusantara: Surabaya
- Sugiyono. 2003. *Metode Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitaitaif dan R&D.* Alfabeta: Bandung
- Singgih Santoso. (2009) *Panduan Lengkap Mengenai Statistik Dengan SSPS 17.* PT Elex Media Kompuntindo: Jakarta
- Syaukani, H.R dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* PustakaBelajar: Yogyakarta
- Udoji Chief J.o. (1981) *The African Publik Servant AS A Public Policy In A African.* Addis Abeba: Africa Association For Publik Andministration And Managemen
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik.* Bayumedia: Malang

Winamo, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teoridan Proses*. Med Press (Anggota IKAPI): Yogyakarta

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Dokumen-dokumen:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Perda Kota Balikpapan No. 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga